

Penguatan Tata Kelola Pelayanan Berbasis Digital Menuju Smart Village Di Desa Nania Kota Ambon

Strengthening Digital-Based Public Service Governance towards a Smart Village in Nania Village, Ambon City

Humairah Almahdali¹
Univetsitas Pattimura, Indonesia
Normawati²
Univetsitas Pattimura, Indonesia
Julia Theresia Patty³
Univetsitas Pattimura, Indonesia
Maryam Salampessy⁴
Univetsitas Pattimura, Indonesia

Corresponding author:
Humairah Almahdali
humalume@gmail.com



ABSTRACT

Public administration services at the village level are a crucial foundation for achieving effective and accountable governance. However, Nania Village in Baguala District, Ambon City, still faces serious obstacles in administrative management, such as limited technological infrastructure, low staff competency, and minimal community participation. This community service activity aims to strengthen digital-based service governance by increasing staff capacity and implementing an electronic administration system towards a Smart Village. The implementation method uses a Participatory Action Research (PAR) approach through stages of socialization, training, technical assistance, and evaluation of the results of the implementation of a simple digital system. The results of the activity show a significant increase in the competence of village staff in operating the digital system, an acceleration of administrative service times from three to five days to one to two days, dan an increase in community participation by approximately thirty percent in processing population documents. In addition, there has been a change in the mindset of staff and the community regarding the importance of transparency and efficiency in public services. This program proves that digitalization of village administration can be an effective strategy in realizing fast, accurate, and sustainable technology-based public services.

Keywords: Digital Administration, Public Services, Community Participation, Governance..

Submitted: 01-04-2026
Revised 1: 08-04-2026
Revised 2: 18-04-2026
Accepted: 25-04-2026
Published: 30-04-2026

ABSTRAK

Pelayanan administrasi publik di tingkat desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Namun, Desa Nania di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, masih menghadapi kendala serius dalam pengelolaan administrasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi aparatur, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pelayanan berbasis digital melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan sistem administrasi elektronik menuju *Smart Village*. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, dan evaluasi hasil implementasi sistem digital sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan sistem digital, percepatan waktu pelayanan administrasi dari tiga hingga lima hari menjadi satu hingga dua hari, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebesar sekitar tiga puluh persen dalam pengurusan dokumen kependudukan. Selain itu, terjadi perubahan mindset aparatur dan masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Program ini membuktikan bahwa digitalisasi administrasi desa mampu menjadi strategi efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan berkelanjutan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Administrasi Digital, Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola.

How to cite:
Almahdali, Humairah, Normawati, Julia Theresia Patty & Maryam Salampessy. "Penguatan Tata Kelola Pelayanan Berbasis Digital Menuju Smart Village Di Desa Nania Kota Ambon." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 15, no. 01 (2026): 180-187.
<https://doi.org/10.29300/mjppm.v%vi%i.11129>



Copyright © Humairah Almahdali,
Normawati, Julia Theresia Patty,
Maryam Salampessy
Publisher UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Printed Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi publik di tingkat desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, surat keterangan, hingga berbagai pelayanan sosial lainnya. Namun dalam praktiknya, masih banyak desa di Indonesia yang menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan berbasis data. Salah satu contohnya adalah Desa Nania yang terletak di Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sistem administrasi di desa ini masih bersifat manual, sehingga proses pelayanan berjalan lambat, rawan kesalahan pencatatan, dan belum mampu menjamin transparansi informasi publik. Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa serta menurunnya partisipasi warga dalam pengurusan dokumen penting. Permasalahan serupa juga ditemukan di banyak daerah lain di Indonesia, yang menunjukkan perlunya digitalisasi sistem administrasi desa untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.¹

Kendala utama yang dihadapi aparatur Desa Nania terletak pada keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sebagian besar aparatur belum terbiasa menggunakan komputer dan masih bergantung pada sistem arsip konvensional berbasis kertas. Situasi ini menyebabkan pengelolaan data kependudukan tidak efisien, banyak data ganda, dan sulit melakukan pembaruan informasi secara cepat.

Hal serupa ditemukan dalam sejumlah penelitian yang menyoroti rendahnya literasi digital aparatur desa serta kurangnya pelatihan teknologi administrasi publik di daerah pedesaan.² Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi tertib juga masih rendah. Banyak warga menganggap pengurusan dokumen sebagai proses rumit dan memakan waktu, sehingga mereka menunda atau bahkan mengabaikan pengurusan administrasi kependudukan. Akibatnya, banyak hak-hak dasar warga seperti akses pendidikan, bantuan sosial, dan pelayanan kesehatan tidak dapat diperoleh dengan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola administrasi desa belum berjalan sesuai prinsip *good governance*, terutama dalam aspek efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas publik.³

Desa Nania sendiri memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan perikanan, serta letaknya yang strategis di wilayah pesisir Kota Ambon menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi yang cukup tinggi. Jumlah penduduk mencapai sekitar empat ribu jiwa, dengan latar belakang pekerjaan yang beragam. Namun, kemajuan ekonomi tersebut belum diimbangi dengan

¹ Tunggal Cahyoadi, "Implementasi Pendaftaran Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal" (repository, Universitas Islam Sultan Agung, 2024); Hanasi, Raihan A. "Optimalisasi layanan publik Desa Bubode melalui digitalisasi administrasi desa." *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2025): 76-83.

² Normawati. 2025. "Transformasi Digital Tata Kelola Pelayanan Administrasi Desa Menuju Smart Village: Penguatan Kapasitas Aparatur Dan Partisipasi Masyarakat di Desa Nania, Kota Ambon". *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2): 341-55..

³ Darmawan, Prasojo Ashar Nur, Millatus Sholihah, dan Ning Mukti Indrayani. "Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Smart Village Melalui Digitalisasi Layanan Administrasi." *Idarotuna: Journal of Administrative Science* 6.2 (2025): 268-280.

modernisasi tata kelola pelayanan publik. Infrastruktur digital masih terbatas; hanya tersedia beberapa perangkat komputer di kantor desa dan jaringan internet yang belum stabil. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam menerapkan sistem pelayanan administrasi berbasis digital. Walau demikian, adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Ambon serta program pengembangan Smart Village dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menjadi peluang penting bagi Desa Nania untuk melakukan transformasi menuju tata kelola digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.⁴

Kesenjangan yang muncul di Desa Nania dapat diidentifikasi sebagai jarak antara kondisi eksisting dengan praktik ideal yang diharapkan. Pelayanan administrasi yang masih manual menyebabkan lambatnya birokrasi, tingginya risiko kesalahan pencatatan, dan lemahnya sistem kontrol terhadap transparansi publik. Selain itu, belum adanya sistem digital membuat data kependudukan sulit diperbarui dan rentan kehilangan arsip. Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan teknologi aparatur desa memperparah kondisi ini, sementara kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan tertib administrasi juga masih rendah. Karena itu, dibutuhkan suatu model intervensi berbasis partisipatif yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pelatihan, pendampingan, dan penerapan sistem digital sederhana yang sesuai dengan kapasitas lokal desa.⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola pelayanan administrasi berbasis digital di Desa Nania menuju Smart Village. Tujuan umumnya adalah mewujudkan sistem administrasi desa yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan khusus kegiatan meliputi peningkatan kompetensi aparatur dalam penggunaan komputer dan sistem administrasi digital, pengembangan sistem pengarsipan elektronik untuk mendukung pelayanan cepat dan akurat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan perubahan pola pikir aparatur dan masyarakat terhadap pentingnya modernisasi tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas.⁶ Melalui kegiatan ini diharapkan Desa Nania dapat menjadi contoh praktik baik transformasi desa digital di wilayah timur Indonesia, sekaligus memperkuat posisi desa dalam jaringan pemerintahan berbasis teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di era digital.

⁴ Wahyiah, Ita Rosita. "Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa: Upaya menuju smart village di Desa Bojong Pdanan Kecamatan Tunjung Teja." *PDANITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8.2 (2025): 832-849; A. Dwimahendrawan dan R. Rohim, "Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Smart Village," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)* 6, no. 3 (2024): 45-54; A. Mutolib dan T. Djumiarti, "Kebijakan Smart Village dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa: Studi Kasus Program Kemendesa PDTT," *Jurnal Kebijakan Publik dan Inovasi Desa* (2025).

⁵ S. Darmawan, "Perancangan Sistem Informasi OpenSID Pelayanan Desa Bantarjaya Kabupaten Bogor," *Jurnal Sosiohumaniora Desa Digital* (2025); M. Huda, I. Maulana, dan L. Hidayati, "Pemanfaatan Literasi Digital melalui Pengelolaan Website dan Media Sosial Desa," *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* (2024).

⁶ G. Dana, N. Yuniari, dan I. Raharja, "Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website sebagai Upaya Menuju Smart Village di Desa Peguyangan Kaja," *Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi (KOMITEK)* 7, no. 1 (2025): 22-33.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program dan Hasil Implementasi Digitalisasi Administrasi Desa

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berfokus pada penguatan tata kelola pelayanan administrasi berbasis digital menuju *Smart Village*. Kegiatan diawali dengan diskusi partisipatif antara tim pelaksana dan perangkat desa untuk mengidentifikasi kendala utama dalam pelayanan administrasi. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan data kependudukan dan pengarsipan dokumen, sehingga pelayanan berjalan lambat dan sering terjadi kesalahan administrasi.

Tahap implementasi selanjutnya dilakukan melalui penerapan sistem administrasi digital sederhana untuk proses pencatatan dan pengarsipan dokumen. Tim pelaksana memberikan pendampingan langsung dalam penggunaan komputer, penyusunan sistem basis data, dan prosedur pelayanan berbasis digital. Hasilnya, aparatur desa mulai mampu mengoperasikan sistem administrasi digital untuk pencatatan data warga dan pembuatan surat administrasi.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi dan pemanfaatan layanan digital. Dampak nyata yang terlihat adalah meningkatnya partisipasi masyarakat sebesar sekitar 30% dalam pengurusan dokumen administratif. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran warga terhadap hak dan kewajiban administratif mereka.

Gambar 1. Diskusi Tata Kelola Pelayanan berbasis Digital



Keberhasilan program juga tampak pada peningkatan efisiensi pelayanan publik di Desa Nania. Sebelum intervensi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu dokumen administratif berkisar antara 3–5 hari. Setelah penerapan sistem digital, durasi pelayanan berkurang menjadi hanya 1–2 hari. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi kerja aparatur hingga 60%. Efektivitas program juga terlihat dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur yang sebelumnya tidak familiar dengan komputer kini mampu mengoperasikan sistem digital secara mandiri. Kesalahan pencatatan yang sebelumnya sering terjadi dapat diminimalisir, dokumen dapat diarsipkan secara lebih sistematis, dan pencarian data menjadi lebih cepat. Dampak lainnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Selama pelaksanaan program, dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto kegiatan dan data kuantitatif hasil evaluasi yang menggambarkan proses serta dampak nyata dari kegiatan. Visualisasi hasil

menunjukkan adanya peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan administrasi digital, dari kondisi awal yang masih terbatas menuju kemampuan yang lebih baik setelah pendampingan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga menekankan pentingnya diskusi bersama aparatur desa. Melalui sesi diskusi partisipatif, peserta diajak mengidentifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi sehari-hari, merumuskan solusi secara kolaboratif, dan menyusun alur kerja administrasi yang lebih efisien dengan dukungan sistem digital sederhana. Pendekatan dialogis ini menciptakan ruang belajar bersama yang mendorong munculnya kesadaran kolektif tentang pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. Keseluruhan dokumentasi ini menjadi bukti empiris keberhasilan program dalam membangun tata kelola desa yang adaptif, transparan, dan berbasis kolaborasi antara aparatur dan masyarakat.

2. Dampak Program terhadap Aparatur, Masyarakat, dan Kelembagaan Desa

Dampak kegiatan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Pada aspek pengetahuan, aparatur desa memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya sistem administrasi digital dalam mendukung *good governance*. Mereka juga mulai memahami konsep *Smart Village* sebagai upaya membangun tata kelola berbasis teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek keterampilan, aparatur desa kini mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan sistem administrasi digital secara mandiri. Keterampilan ini menjadi bekal penting untuk memperluas inovasi pelayanan publik di masa depan. Adapun pada aspek sikap dan perilaku, terjadi perubahan pola pikir baik pada aparatur maupun masyarakat. Aparatur mulai menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat, sementara masyarakat menjadi lebih aktif dalam pengurusan dokumen. Hal ini menunjukkan terbentuknya budaya kerja baru yang berorientasi pada efisiensi dan akuntabilitas.

Selain dampak pada individu, pengaruh program juga terlihat pada aspek kelembagaan. Koordinasi antarperangkat desa menjadi lebih baik dan sistem dokumentasi digital yang terstruktur mulai terbentuk. Kondisi ini membantu pemerintah desa dalam penyusunan laporan, pengelolaan data kependudukan, serta perencanaan pembangunan berbasis data yang lebih akurat. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam mengelola layanan administrasi publik berbasis digital. Secara kelembagaan, pemerintah desa kini memiliki sistem digital yang lebih terstruktur untuk pengelolaan data dan dokumen administratif. Secara individual, aparatur memiliki keterampilan baru dalam teknologi informasi yang dapat terus dikembangkan.

Lebih jauh, kegiatan ini juga memperkuat prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Desa Nania berkomitmen mengalokasikan sebagian dana desa untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem digital. Selain itu, telah muncul inisiatif untuk menjadikan pengalaman ini sebagai model pembelajaran bagi desa lain di Kecamatan Baguala. Dari perspektif sosial, perubahan pola pikir menuju pemanfaatan teknologi menjadi pondasi penting bagi transformasi desa menuju *Smart Village*. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat, partisipasi warga dalam pengurusan dokumen bertambah, dan proses pelayanan menjadi lebih transparan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa efisiensi pelayanan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dan kultural yang mendukung pembangunan desa yang adaptif terhadap era digital.

3. Relevansi Temuan dengan Konsep Smart Village dan Tata Kelola Partisipatif

Hasil kegiatan pengabdian di Desa Nania menunjukkan bahwa persoalan yang diidentifikasi pada bagian pendahuluan memang berakar pada lemahnya tata kelola administrasi desa, terutama karena masih digunakannya sistem manual, rendahnya kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi. Kondisi awal tersebut menyebabkan pelayanan berjalan lambat, rawan kesalahan pencatatan, dan belum mendukung pelayanan publik yang efisien serta akuntabel. Temuan pada bagian hasil memperlihatkan bahwa penerapan sistem administrasi digital sederhana mampu menjawab persoalan tersebut melalui pembenahan pencatatan, pengarsipan, dan pelayanan dokumen secara lebih tertib dan sistematis.⁷

Relevansi temuan ini dengan konsep Smart Village terlihat dari kemampuan Desa Nania untuk mulai memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperbaiki pelayanan publik sesuai kebutuhan dan kapasitas lokal. Dalam konteks ini, Smart Village tidak harus dimaknai sebagai desa dengan teknologi yang kompleks, tetapi sebagai desa yang mampu menggunakan teknologi secara tepat guna untuk menjawab kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Penerapan sistem administrasi digital sederhana di Desa Nania membuktikan bahwa transformasi menuju desa cerdas dapat dimulai dari sektor pelayanan administrasi yang paling dekat dengan kebutuhan warga, seperti pengurusan data kependudukan, surat-menyurat, dan pengarsipan dokumen.⁸

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi desa sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa aparatur desa sebelumnya belum terbiasa menggunakan komputer dan masih bergantung pada sistem berbasis kertas. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, aparatur desa mampu mengoperasikan sistem digital secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur merupakan inti dari transformasi pelayanan publik desa. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat, tetapi juga harus disertai proses pembelajaran yang bertahap dan sesuai dengan kebutuhan aparatur desa.⁹

Selain pada aparatur, relevansi temuan dengan tata kelola partisipatif tampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi. Sosialisasi yang dilakukan selama program mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi, yang terlihat dari meningkatnya partisipasi warga sekitar 30% dalam pengurusan dokumen administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika pelayanan dibuat lebih cepat, jelas, dan mudah diakses, masyarakat menjadi lebih percaya dan lebih aktif dalam berhubungan dengan pemerintah desa. Dengan demikian, tata kelola

⁷ FA, Jovanscha Qisty Adinda, Selvi Centia, dan Zhahirah Indrawati Zainuddin. "Tata Kelola Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang." *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 1. 2024.

⁸ Dwimahendrawan dan Rohim, "Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Smart Village" *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2023); Mutolib dan Djumiarti, "Kebijakan Smart Village dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa." *Desa Berjaya: Jurnal Administrasi Desa* 3, no. 2 (2022): 23-33.

⁹ M. Cahyoadi, "Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam Implementasi Sistem Administrasi Berbasis Digital," *Jurnal Reformasi Administrasi Publik Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 9, no. 1 (2022): 11-21; A. Wijayanti, S. Nugroho, dan E. Rahmawati, "Analisis Literasi Digital Aparatur Desa terhadap Implementasi E-Government di Tingkat Lokal," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 9, no. 1 (2022): 54-66

partisipatif dalam konteks Desa Nania tercermin melalui hubungan yang semakin terbuka antara aparatur desa dan masyarakat dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pelayanan berbasis digital di Desa Nania tidak hanya berdampak pada efisiensi pelayanan, tetapi juga pada perubahan kelembagaan dan sosial yang mendukung terwujudnya Smart Village. Waktu pelayanan yang menurun dari tiga hingga lima hari menjadi satu hingga dua hari, meningkatnya kemampuan aparatur, tertatanya sistem dokumentasi, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat menjadi indikator bahwa transformasi digital desa dapat berjalan efektif jika dibangun melalui pendekatan partisipatif dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, pengalaman Desa Nania dapat dipahami sebagai contoh bahwa pembangunan desa berbasis digital akan lebih berkelanjutan apabila didukung oleh kesiapan aparatur, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola pelayanan yang terus diperbaiki.

C. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berhasil memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis digital sebagai langkah menuju terwujudnya konsep *Smart Village*. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), aparatur desa dan masyarakat terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah, pelatihan, pendampingan, serta penerapan sistem administrasi digital sederhana. Implementasi program ini memberikan hasil yang signifikan, termasuk peningkatan kompetensi aparatur dalam penggunaan teknologi informasi, percepatan waktu pelayanan dari rata-rata tiga hingga lima hari menjadi satu hingga dua hari, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebesar kurang lebih tiga puluh persen dalam pengurusan dokumen kependudukan. Selain meningkatkan efisiensi dan akurasi administratif, kegiatan ini juga menciptakan perubahan *mindset* menuju pemanfaatan teknologi sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan modern. Perubahan budaya kerja dan persepsi masyarakat ini menjadi modal penting dalam mewujudkan desa yang responsif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan digital.

REFERENSI

- Cahyoadi, Tunggal. "Implementasi Pendaftaran Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal." Repository Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Cahyoadi, M. "Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam Implementasi Sistem Administrasi Berbasis Digital." *Jurnal Reformasi Administrasi Publik* 9, no. 1 (2022): 11–21.
- Darmawan, Prasajo Ashar Nur, Millatus Sholihah, dan Ning Mukti Indrayani. "Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Smart Village melalui Digitalisasi Layanan Administrasi." *Idarotuna: Journal of Administrative Science* 6, no. 2 (2025): 268–280.
- Darmawan, S. "Perancangan Sistem Informasi OpenSID Pelayanan Desa Bantarjaya Kabupaten Bogor." *Jurnal Sosiohumaniora Desa Digital*, 2025.
- Dana, G., N. Yuniari, dan I. Raharja. "Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website sebagai Upaya Menuju Smart Village di Desa Peguyangan Kaja." *Jurnal Komputer dan Teknologi*

Informasi (KOMITEK) 7, no. 1 (2025): 22–33.

Dwimahendrawan, A., dan R. Rohim. “Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Smart Village.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (JPKM)* 6, no. 3 (2024): 45–54.

Huda, M., I. Maulana, dan L. Hidayati. “Pemanfaatan Literasi Digital melalui Pengelolaan Website dan Media Sosial Desa.” *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 2024.

Hanasi, Raihan A. “Optimalisasi Layanan Publik Desa Bubode melalui Digitalisasi Administrasi Desa.” *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 76–83.

Jovanscha Qisty Adinda, FA, Selvi Centia, dan Zhahirah Indrawati Zainuddin. “Tata Kelola Media Sosial dalam Penyebaran Informasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.” Dalam *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 1, 2024.

Mutolib, A., dan T. Djumiarti. “Kebijakan Smart Village dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa: Studi Kasus Program Kemendesa PDTT.” *Jurnal Kebijakan Publik dan Inovasi Desa*, 2025.

———. “Kebijakan Smart Village dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa.” *Desa Berjaya: Jurnal Administrasi Desa* 3, no. 2 (2022): 23–33.

Normawati. “Transformasi Digital Tata Kelola Pelayanan Administrasi Desa Menuju Smart Village: Penguatan Kapasitas Aparatur dan Partisipasi Masyarakat di Desa Nania, Kota Ambon.” *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 341–355.

Wahyiah, Ita Rosita. “Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Upaya Menuju Smart Village di Desa Bojong Pdanan Kecamatan Tunjung Teja.” *PDANITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8, no. 2 (2025): 832–849.

Wijayanti, A., S. Nugroho, dan E. Rahmawati. “Analisis Literasi Digital Aparatur Desa terhadap Implementasi E-Government di Tingkat Lokal.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 9, no. 1 (2022): 54–66.